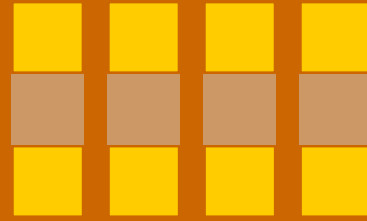


B  
U  
L  
E  
T  
I  
N  
D  
I  
G  
E  
S  
T  
I  
A  
L

**EDISI 34 / 20 MARET—20 MEI 2013**

# International Relations News



## PARADOX OF PLENTY



**Diterbitkan oleh :**

**KORPS MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

site: [komahi.umy.ac.id](http://komahi.umy.ac.id) | e-mail: [persmakomahiumy@yahoo.com](mailto:persmakomahiumy@yahoo.com)

## DAFTAR ISI

### Fokus I

Background Paradox Of Plenty  
(4)

### Fokus II

Paradox Of Plenty di Timur  
Tengah (5)

### Fokus III

Indonesia : Paradox Of Plenty?  
(6)

### Fokus IV

Diplomatic Governance Sebagai  
Jawaban Atas Kemunduran  
Diplomasi Indonesia Pada Era  
Paradox Of Plenty (7)

### Fokus V

Refleksi Globalisasi Atas Neo-  
Kolonialisasi (8)

### Profil

Terry Lynch (12)

### Reportase

UMY: PTS Terbaik (13)

**Komentar Dosen dan  
Mahasiswa(15)**

## HIGHLIGHT



**UMY  
PTS  
TERBAIK**

# Beranda Redaksi

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kekhadirat Allah SWT yang selalu miridhai segala hal baik yang selalu kita lakukan. Shalawat beserta salam pula tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW.

Rasa syukur dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan IRN Digital edisi 34 yang merupakan edisi pertama pada periode ini sehingga dapat diterbitkan.

Tema pada bulletin kali ini adalah Paradox of Plenty. Tema ini merupakan salah satu tema baru yang sedang hangat di perbincangkan di kalangan intelektual HI, namun masih sangat tabu di kalangan mahasiswa. Paradox of Plenty dalam perkembangannya semakin menunjukkan adanya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang.

Dalam buletin ini akan dibahas lebih jauh mengenai paradox of plenty yang terjadi di berbagai negara dalam beberapa dekade ini. Di samping itu, buletin ini juga mengkaji hal-hal terkait paradox of plenty yang menarik bagi kaum intelektual HI di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Harapan kami dari penerbitan buletin ini menjadi sarana bagi anda untuk menambah wawasan serta mengembangkan intelektualitas dalam mengkritisi isu-isu yang terjadi di ranah Hubungan Internasional. Demikian pengantar dari Redaksi, semoga ilmu yang di dapatkan dapat diaplikasikan secara nyata di masyarakat.

Wassalamu alaikum wr. Wb.

**Buletin IRN Digital ini  
diterbitkan oleh  
Divisi Pers Mahasiswa  
Korps Mahasiswa Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Penasehat:**

Ali Muhammad, MA., Ph.D.

**Penanggung Jawab Umum:**

Reza Fahmi

**Pimpinan Umum:**

Reynita Hutami Adiningsih

**Pimpinan Redaksi:**

Mira Dewi

**Reporter:**

Deansa Sonia Hefranesa  
M. Nizar Sohyb  
Novita Permata Aji  
Indra Jaya Wiranata  
M. Faldi Baskoro H.  
Achmas Zulfikar  
Diah Sulung Syafitri  
Anif Kusuma Ningrum  
Zuha Destia Anmonita

**Editor:**

Julia Rizky

**Layout:**

Sarah Nur Ramadhani

**Sirkulasi dan Iklan:**

Nanang Khoirino  
M. Satria Alamsyah  
Richo Bimapaksi  
Ragil Risky Rachman

**Alamat Redaksi:**

Sekretariat KOMAHI UMY  
Gedung Ki Bagus Hadikusumo  
Lt. 2 UMY

## *Background Paradox Of Plenty*

Indonesia di Asia Tenggara, Iran dan Sudan di Semenanjung Arab, Hingga Negara-Negara Afrika seperti Nigeria dan Angola juga sebagian negara-negara di Amerika Selatan adalah potret jelas bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya melimpah belum tentu mampu mensejahterahkan rakyatnya. Paradox of plenty merupakan istilah yang dikemukakan Terry Lynch (2006) untuk menjelaskan fenomena tersebut dimana negara kaya sumber daya yang harusnya kaya malah menjadi miskin.

Penyebab utamanya diakibatkan adanya ketidaksetaraan ekonomi negara berkembang dengan negara maju. Negara maju pada umumnya memiliki kemajuan teknologi yang mendukung terhadap pengelolaan sumberdaya maupun informasi memadai tentang tingkat konsumsi minyak maupun pemetaan konsumen minyak di seluruh dunia dibandingkan dengan negara berkembang.

Negara produsen pada umumnya tidak memiliki posisi tawar ekonomi yang baik bila dihadapkan dengan negara-negara maju, Ketidakseimbangan nilai antara barang mentah dengan barang jadi sehingga selisih nilai dari barang mentah menjadi milik negara maju. . Pada saat seperti inilah peran agen-agen asing akan membujuk negara produsen untuk menjual SDA kepada negara maju.

Oleh karena itu, negara maju bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dengan lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Akibatnya hasil ekstraksi sumber daya tersebut yang seharusnya dimaanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagian besar malah terlempar ke tangan asing.

Negara produsen pada umumnya tidak memiliki posisi tawar ekonomi yang baik bila dihadapkan dengan negara-negara maju, Ketidakseimbangan nilai antara barang mentah dengan barang jadi sehingga selisih nilai dari barang mentah menjadi milik negara maju. Pada saat seperti inilah peran agen-agen asing akan membujuk negara produsen untuk menjual SDA kepada negara maju. Yang pada akhirnya membuat negara-negara produsen menjadi sangat tergantung dan tidak mampu mengembangkan perekonomian dan pembangunan.(Nizar)

## *Paradox Of Plenty di Timur Tengah*



**Akhmad Zulkhan-HI 2011**

Sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur yang menentukan kaya atau tidaknya sebuah negara. Dimana definisi kaya itu sendiri tidak lebih dari sebuah tafsir hampa belaka. Lalu apakah sebuah negara yang memiliki kapasitas sumber daya alam yang berlebih dapat dikatakan sebagai negara yang berhasil secara ekonomi? Jawabnya belum tentu. Mengapa? Dalam realitanya, mayoritas negara yang memiliki natural resources dalam jumlah yang lebih justru masuk kedalam liang lahatnya sendiri. Seperti Kongo, Nigeria, bahkan Afrika Tengah sekalipun selalu memiliki awal bagus dan akhir cerita buruk yang sama. Hal – hal semacam ini yang membuat keberadaan sumber daya alam yang seharusnya sebuah berkah justru menjelma menjadi kutukan,

seperti yang diungkapkan oleh Paul Collier, sumber daya alam sebagai “resource curse”.

Fenomena resource curse tersendiri memiliki jangkauan yang hampir merata di seluruh dunia. Ironinya, kutukan semacam ini benar – benar menjadi sebuah hantaman keras bagi negara yang memiliki natural resources berlebih, sehingga mampu melumpuhkan negara yang bersangkutan tidak hanya secara teropong ekonomi saja, namun hingga lingkup sosial dan politiknya. Eksploitasi dari perusahaan – perusahaan asing bukanlah satu satunya penyebab dari semakin kritisnya infeksi resource curse itu sendiri. Tidak tertatanya strata sosial dan edukasi yang lemah serta ratusan faktor – faktor x lainnya mengakibatkan lumpuhnya kemampuan negara untuk perlahan melangkah menuju negara berdikari.

Banyaknya fenomena macam ini telah menimbulkan sebuah paradoks yang dikenal sebagai “paradox of plenty” yang berbicara mengenai himpunan eksploitasi berlebihan terhadap natural resources di negara – negara yang dikategorikan “kaya” secara naif, sedangkan dalam realitanya negara – negara tersebut tidak pernah benar – benar mampu memanfaatkan kekayaan itu sendiri untuk struktural fungsional dan kepentingan mereka sendiri. Selalu ada pihak – pihak kedua maupun ketiga yang turun tangan dalam topeng penyelamat berkedok 12 pasal natural resource charter. Namun mayoritas tersebut berakhir sama, akhir yang buruk dan sengketanya yang tiada habisnya.

## *Indonesia : Paradox Of Plenty?*

Fenomena Paradox of Plenty, dimana sebuah negara dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan seharusnya kaya malah miskin. Fenomena ini terjadi tidak hanya di satu atau dua negara saja, melainkan di sebagian besar negara kaya SDA seperti Iran, Sudan, Nigeria, Angola, dan sangat tidak asing lagi yaitu Indonesia.

Istilah fenomena yang dikemukakan oleh Terry Lynch (2006) ini terjadi dikarenakan beberapa sebab, seperti Asimetri Ekonomi, negara maju umumnya memiliki teknologi untuk melakukan pengolahan sumber daya maupun informasi yang memadai mengenai harga minyak, konsumsi minyak, maupun pemetaan minyak di seluruh dunia dibandingkan dengan negara berkembang. Oleh karena itulah, negara maju mampu mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam lebih baik daripada negara berkembang. Yang kemudian akhirnya, sebagian besar sumber daya alam tersebut tidak dinikmati oleh negara berkembang itu sendiri, melainkan negara maju. Selain asimetri ekonomi, penyebab lainnya yaitu munculnya agen asing, yang disini bukanlah merupakan perantara kepentingan ekonomi antara negara ketiga dengan negara maju, melainkan tugasnya untuk membujuk negara ketiga menjual SDA-nya ke n e g a r a m a j u,

melainkan tugasnya untuk membujuk negara ketiga menjual SDA-nya ke negara maju dengan harga murah, sehingga disini yang dirugikan adalah negara ketiga atau negara berkembang.

Faktor utama Indonesia mengalami Paradox of Plenty adalah Kepemimpinan Nasional. Faktor tersebut sangatlah krusial dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, misalnya minyak. Di Indonesia, kepemimpinan untuk mengatur sektor energi minyak diatur asing. Proporsi produksi minyak mentah Indonesia yang mencapai 950 ribu kiloliter setiap harinya, 70 persen milik asing dan 30 persen sisanya milik Pertamina. Adanya dominasi asing tersebut dikarenakan kerakusan pemerintah untuk menjual besar-besaran sektor energi, terutama minyak ke swasta asing untuk terus menambah pendapatan nasional dalam APBN. Pertamina tidak memiliki cukup kapabilitas untuk ekspansi eksplorasi minyak ke luar negeri karena sektor .

pendapatan Pertamina hanya menjadi sapi perah bagi para elit politik Indonesia, oleh karena itu ketergantungan produksi minyak terhadap negara asing masih sangat besar. Oleh karena itu, sebaiknya Indonesia melakukan nasionalisasi minyak nasional yang dikuasai asing karena hal tersebut menyangkut martabat ekonomi nasional. Kepemimpinan menjadi faktor penting dalam nasionalisasi tersebut, apakah pro rakyat atau swasta asing. (Indra)

# FOKUS 4

## *Diplomatic Governance Sebagai Jawaban Atas Kemunduran Diplomasi Indonesia Pada Era Paradox Of Plenty*



**Aditya Maulana Hasymi**  
HI UMY 2010

Keadaan dimana ketika informasi yang datang begitu banyak namun justru pemanfaatan akan informasi tersebut disia-siakan, atau justru terjadi penyalahgunaan informasi yang dikenal sebagai era “*paradox of plenty*”. Informasi yang melimpah hendaknya menjadi modal berharga bagi diplomat dalam hal menjalankan diplomasi publik yang efektif. Kemunduran dalam pelaksanaan diplomasi publik merupakan hasil atas penerapan diplomasi yang terlihat “kaku” dan tidak efektif. Sebagai contoh, adanya tumpang tindih atas peran yang dijalankan oleh para diplomat. Problem tersebut terus terjadi berulang kali sehingga menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam melakukan diplomasi pada era dimana sumber informasi begitu melimpah.

Nye (2004: 107) menyebutnya sebagai ‘*paradox of plenty*’ yang dapat diuraikan dalam empat hal, yaitu: (1) Perlu untuk mengetahui persepsi dan sikap publik global terhadap suatu negara tertentu mengingat pasca Perang Dingin banyak terjadi realiansi politik dan ekonomi.

(2) Transparansi media komunikasi membuat kelompok sasaran tidak terbatas pada satu negara saja, tapi berada pada tatanan global. (3) Menurunnya kredibilitas pesan yang ada dalam proses diplomasi publik. Masyarakat cenderung mempersepsikan apa yang dikomunikasikan oleh pemerintah sebagai bentuk propaganda. (4) Muncul banyak saluran komunikasi yang membutuhkan peninjauan ulang terhadap model komunikasi apa yang mesti digunakan.

Atas dasar ketidaksiapan Indonesia dalam melakukan diplomasi pada era Paradox of Plenty, usulan yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan strategi Diplomatic Governance. Dalam penerapannya strategi Diplomatic governance menitikberatkan pada 3 hal penting yakni, perlakuan yang adil pada setiap personal yang terlibat dalam diplomasi publik atau fairness, aplikasi diplomasi publik yang dapat dihitung secara jelas dalam mekanismenya atau accountable serta pelaksanaan diplomasi publik yang terbuka dan dapat dipantau oleh khalayak ramai atau disebut transparant.

3 prinsip diatas yang merupakan pencerminan dari strategi Diplomatic Governance diharapkan mampu mewujudkan diplomat Indonesia yang cakap berkomunikasi dan mampu mengeluarkan klarifikasi secara cepat dalam menghapi percaturan diplomasi di era Paradox of Plenty, terutama dalam menjalankan misi diplomasi publik.

## Refleksi Globalisasi Atas Neo Kolonialisasi

Tengku H (HI UMY 2010)

*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.—(Q.S. al-Nisa' (4) ayat 135)*

Semakin tuanya usia globalisasi dan kapitalisme global, makin banyak pula keragaman masalah sosial yang bermunculan. Kerusakan sosial dimana-mana. Korban-korban sosial jadi bahan tontonan. Kaum tertindas pun bertambah. Di negeri ini, kehadiran kaum tertindas dapat terlihat sebagai manifestasi penyelenggaraan pemerintahan yang krisis. Penindasan terjadi dari konsletnya struktur ekonomi-politik .

Kemudian, siapakah kaum tertindas? Menurut paulo Freire, ada dua kategori kaum tertindas. *Pertama*, adalah orang yang teralienasi dari dirinya sendiri dan lingkungannya. *Kedua*, mereka mengalami *self-depreciation*, merasa bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Dalam bahasa islami, dapat disebut sebagai kaum *du'afa*, renta ekonomi yang mengakibatkan menjadi *mustad'afin*, renta politik dan lemah harkat kemanusiaannya. Di lingkungan kita ini mereka hadir dimana-mana, karena merupakan mayoritas dalam masyarakat kita. Dalam keseharian, seringkali kehadiran mereka tidak menyentuh nurani kita, layaknya sebagai pemandangan sosial. Jika digolongkan, mereka adalah golongan petani berlahan sempit, petani marhaen (punya cangkul, tidak punya sawah), kaum buruh, kaum perempuan, kaum miskin kota, dan masyarakat adat.

Ada sebuah gagasan yang luar biasa, hingga menjadi fenomena, dan mampu mempengaruhi pemikiran manusia secara mendunia. Gagasan itu disebut "globalisasi", yang hampir menjadi "kepercayaan" baru bagi manusia, karena asumsi dasarnya dapat memecahkan masalah kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat Dunia Ketiga, (yang pada awalnya) melalui "pembangunanisme". Kemudian, kata "pembangunan" diidentikan dengan "perubahan sosial".

Di Indonesia, setelah jatuhnya Orde Baru, dimulailah gembar-gembor kata "demokrasi" yang menjadi diskursus dominan pasca kejatuhan Soeharto, kata "demokrasi"pun menjadi semboyan era reformasi. Demokrasi dapat dibuktikan (secara pragmatis) dengan munculnya parta-partai politik baru, walaupun kata "demokrasi" sudah ada pada masa Orde Baru. Lebih jauh, "pembangunan" menurut Orde Baru tetap beriringan dengan "demokrasi".

Kekacauan politik dan kondisi ekonomi yang buruk telah memukul mundur rezim Orde Baru, maka muncullah era reformasi. Untuk menanggulangi krisis ekonomi yang ada, maka pemerintahan yang baru menerima pinjaman (hutang) lagi dari *International Monetary Found* (IMF) dan *World Bank* (WB). Semua itu, dapat diartikan sebagai bertambah lebar pintu masuk modal asing ke Indonesia. Itulah mengapa Indonesia semakin terintegrasi dengan kapitalisme global melalui tuntutan dari *Structural Adjustment Program* (SAP) yang harus dipatuhi. Karena,



Demokrasi era reformasi menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas, maka selain ekonomi, seperti politik dan budaya, harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya, hubungan antara budaya dengan ekonomi, kebudayaan dalam negeri harus terbuka terhadap budaya Asing dalam hal apa saja, dalam hal; IPTEK, *fashion & lifestyle*, dll.

Dari 1998 hingga kekinian (2013), pemerintahan tetap tergantung dengan modal (borjuasi) sebagai pemicu dari pertumbuhan ekonomi. Karena itu, walaupun dengan adanya otonomi daerah, kebijakan-kebijakan tetap dilakukan secara sentralistik dalam lokal-jenius (kedaerahan) tertentu dan dilaksanakan secara *top-down*. Negara dengan ekonomi kapitalistik, mengerahkan aparatur dengan skala besar, hingga akhirnya menjadi birokratis. Anggaran ekonomi banyak yang nyangkut di tingkatan birokrasi, sehingga banyak rakyat tidak merasakan. Masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek sasaran proyek pembangunan, yang belum pasti bermanfaat bagi masyarakat. Akibatnya jika kita perhatikan sekarang, birokrasi menjadi buncit, berita korupsi menjadi-jadi, sementara rakyat kebanyakan tetap saja menderita. Jika diperhatikan, pemerintah pusat terkesan tidak mengerti apa yang sedang dibutuhkan rakyat. Seringkali kebijakan ekonomi (ataupun yang berdimensi ekonomi) tidak berimplikasi besar bagi masyarakat kelas bawah, justru cenderung menguntungkan para kaum pemodal (borjuasi) saja. Maka dari itu, perencanaan ekonomi negara harus demokratis dari bawah ke-atas, bukan demokrasi tipuan, yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Telah sekian lama, gagasan globalisasi merasuki pikiran tanpa penyaringan. Jikalau ada pembicaraan, itupun diseputar mengenai cara, perkembangan IPTEK dan budaya baru, fatamorgana belaka, jarang di tataran prinsip. Inilah kenyataan yang boleh dikatakan, ternyata secara tersembunyi, globalisasi disetujui oleh sebagian besar masyarakat, birokrat pemerintah, akademisi, dll.

Lalu apa yang salah dari globalisasi? Ternyata dibaliknya ada ideologi dan teori kapitalisme yang kini menjadi arus utama dalam menciptakan berbagai macam ketidakadilan dan melanggengkan struktur ekonomi yang timpang dan ketergantungan, mengokohkan dominasi kultur hingga pengetahuan, perusak politik, bahkan merusak lingkungan juga.

Di Indonesia, globalisasi dan kapitalisme makin banyak melahirkan persoalan baru, seperti lemahnya posisi *bargain* rakyat terhadap pemerintah, menjamnya tingkat kesenjangan sosial-ekonomi antara pusat dan daerah, kota dan desa, kaya dan miskin, terpelajar dan tidak terpelajar, serta sektor industri modern dan tradisional. Bagaimanapun indahnya globalisasi di mata kita, ternyata dia biang keladi terhadap persoalan-persoalan, baik sosial, politik, maupun budaya .

Dasar-dasar ekonomi-politik kapitalisme yang diselenggarakan oleh pemerintah ternyata membawa dampak merugikan, khususnya bagi golongan miskin. Masalahnya bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dipaksakan karena ketergantungannya dengan negara-negara industri maju, sehingga cenderung mengikuti cara pembangunan berdasarkan investasi dalam pertumbuhan ekonominya. Kebijakan semacam itu tentunya sangat menguntungkan kelompok kepentingan yang beraliansi pada kelas penguasa. Korban paling mencolok dari berbagai kebijakan terselubung itu pastinya kalangan rakyat miskin yang terus menjadi sasaran eksploitasi.

Dari banyak penelitian yang diinformasikan, salah satunya mengenai petani, ternyata golongan petani miskin acapkali menjadi korban dari kebijakan, mereka selalu terlibat konflik tanah dengan penguasa maupun pengusaha. Banyak yang tanahnya digusur untuk kepentingan umum maupun investor. Kebijakan pemerintah dalam pertanian, cenderung menghitung untung-rugi bagi pemerintah dan pemodal. Keadaan ini sering mengakibatkan kemerosotan dalam sektor pertanian kita, dari petaninya hingga pangan dalam negeri kita.

Semakin banyak petani terpinggirkan dan tergusur dari sawah dimana mereka menggantungkan hidupnya. Selain petani, kaum miskin kota dan fakir miskin yang dalam konstitusi harus dilindungi negara, justru digusur secara paksa dari tempat tinggal yang mereka miliki. Anak jalanan juga seharusnya dilindungi oleh negara, jelas bukan salah mereka sepenuhnya jika ada aksi kriminalitas dari mereka. Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, justru di obral dengan program privatisasi. Bayangkan, kekayaan negeri ini ibarat dirampok dan diperuntukkan bagi segelintir manusia lain yang menghabiskan dunianya hanya dengan memikirkan keuntungan belaka! UUD 1945 sebagai *revolutigrondwet* (UUD Revolusioner), sekarang dilucuti dan dikalahkan oleh kebijakan ekonomi-politik yang berorientasi pada persaingan dalam pasar bebas. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang hidupnya miskin tidak mampu keluar dari kemiskinan.

Meski globalisasi dikampanyekan sebagai suatu era yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global, tetapi sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan *developmentalism* sebelumnya.

Secara teoritis, sebenarnya banyak sekali persamaan antara kolonialisme liberal dengan neoliberalisme yang dibungkus dengan globalisasi saat ini. Akan tetapi dengan globalisasi, menjadikan penindasan lebih canggih dari segi mekanismenya dan dibangun secara global melalui kebijakan internasional. Secara kultur, globalisasi adalah hegemoni kultural dan *aparatus ideology* dan sangat *discursive*, karena hanya sebagian kecil golongan elit yang mendominasi agenda, yang menentukan nilai dan arah masa depan ekonomi mau dibawa seperti apa. Maka dari itu, globalisasi anti-demokratis, yang pada dasarnya adalah pengulangan kembali pola sejarah dari model kolonialisme, setelah melewati pasca kemerdekaan, yang disebut oleh Bung Karno sebagai NEKOLIM (Neokolonialisme-Imperialisme).

Globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global, memiliki aktor-aktor fundamen sebagai pemain. Terdapat tiga aktor globalisasi. *Pertama*, Perusahaan-perusahaan Transnasional (TNCs). Perusahaan-perusahaan besar berskala internasional ini acapkali tidak memiliki status kewarganegaraan, dan menggemborkan kebebasan dalam bergerak kemana saja untuk mengejar kepentingan mereka, yaitu akumulasi modal sebanyak-banyaknya. *Kedua*, *World Trade Organization* (WTO). Organisasi Perdagangan

Para aktor globalisasi diatas menetapkan aturan-aturan mengenai investasi, perdagangan dan finansial berskala internasional. Sifatnya adalah mempengaruhi negara-negara berkembang melakukan penyesuaian lewat regulasi-deregulasi nasionalnya, untuk memperlulus pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global yang dikuasai oleh aktor-aktor globalisasi tersebut. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh suatu negara berkembang adalah melakukan regulasi-deregulasi demi mulusnya perluasan usaha TNCs untuk mengekspansi produksi, dan ekspansi investasi. Maka jelaslah, bahwa globalisasi tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial negara Dunia Ketiga, melainkan berhubungan erat dengan motif akumulasi kapital oleh negara-negara kaya beserta perusahaan perusahaan raksasanya (TNCs).

Dari berbagai penjelasan sebelumnya, ternyata kita faham bahwa fenomena globalisasi telah mengancam kehidupan banyak manusia. Di Indonesia, beberapa ancaman globalisasi adalah semakin derasnya ekspansi kapital, ekspansi investasi, produksi TNCs didalam negeri dan pasar bebas. Hal-hal seperti itulah yang secara struktural menjadikan proses penindasan dan peminggiran, seperti buruh/karyawan, anak-anak jalanan, pekerja seks komersil, kaum miskin kota, masyarakat adat, serta petani miskin. Jelas kaum tertindas dikebiri haknya, lihatlah “kebutuhan pokok” rakyat dilucuti dengan dikurangi maupun dicabut subsidi. Semestinya bahwa ketersediaan kebutuhan kehidupan yang layak, pekerjaan, kekayaan alam, pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan adalah kewajiban serta tanggungjawab negara atas rakyatnya, seperti yang telah dituliskan dalam UUD 1945 kita yang revolusioner.



**Terry L. Karl, MA, PhD.**  
**Professor of Political Science, Gildred Professor of Latin American Studies, William and Gretchen Kimball University.**

Terry Lynn Karl adalah seorang profesor ilmu politik di stanford university. Dia telah dipublikasikan secara luas pada transisi menuju demokrasi, ketidaksetaraan, hak asasi manusia dan perang sipil dengan penekanan khusus pada politik negara-negara pengeksport minyak. Karyanya membahas tentang booming minyak dan kemiskinan rakyat afrika. Karl memenangkan banyak penghargaan mengajar dan publikasi, dia menerima gelarnya dan ph.D di ilmu politik universitas stanford.

Paradox of Plenty menjelaskan mengapa di tengah-tengah dua booming minyak besar-besaran di tahun 1970-an, pengeksport minyak pemerintah berbeda seperti Venezuela, Iran, Nigeria, Aljazair, dan Indonesia memilih jalan pembangunan umum dan menderita dengan memperoleh hasil yang mengecewakan. Karl menerangkan berbagai faktor terkait ekonomi, politik, dan sosial yang menentukan sifat dari negara minyak, dari koherensi birokrasi publik, dengan tingkat sentralisasi, dengan pola pembuatan kebijakan.

Karl berpendapat bahwa di negara-negara, ketergantungan fiskal yang tidak proporsional pada petrodolar dan belanja publik

dengan mengorbankan kenegaraan. Minyak membuat booming, yang menciptakan ilusi kemakmuran dan pembangunan, sebenarnya hal ini hanya mengguncang rezim dengan memperkuat kepentingan berbasis minyak dan kapasitas negara yang kian lemah.

Penyelidikan tajam Karl menyatukan pendekatan struktural dan pilihan berbasis dengan menerangi bagaimana keputusan pembuat kebijakan yang tertanam di lembaga-lembaga berinteraksi dengan pasar domestik dan internasional. Pendekatan ini menggunakan sektor negara terkemuka sebagai titik awal untuk mengidentifikasi berbagai pengambilan keputusan pilihan, dan berakhir dengan memeriksa dinamika negara itu sendiri. (Anif)

# UMY : PTS TERBAJK

## Reportase



Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) berhasil menjadi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng). Seperti yang dilansir oleh surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) pada Sabtu (9/2) lalu bahwa penilaian tersebut berdasarkan data Webometrics dipicu juga karena UMY semakin terbuka dan banyak memberikan informasi pada masyarakat.

Tidak hanya itu, UMY berhasil meraih posisi ke-14 dengan performa dan popularitas situs web terbaik se Indonesia versi Webometrics dan PTS terbaik ke 3 se-Indonesia, sekaligus menjadi PTS pertama di DIY dan Jateng.

Penilaian tersebut berdasarkan empat komponen utama, yaitu Presence Rank, Impact Rank, Openness Rank dan Excellence Rank. Dalam surat kabar KR, Wahyudi, ST. MT. selaku kepala Biro Sistem Informasi (BSI) UMY menjelaskan bahwa Presence Rank terkait dengan jumlah halaman website, Impact Rank adalah jumlah link yang masuk, Openness Rank adalah jumlah karya ilmiah, sedangkan Excellence Rank adalah jumlah jurnal internasional.

Selain keberhasilan UMY menjadi PTS terbaik di Jateng dan DIY, UMY juga berhasil meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan tersebut terdapat pada SK BAN PT No 061/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013.

Ada tujuh komponen utama yang dinilai oleh BAN-PT dalam memberikan akreditasi, yakni visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, tata pamong kepemimpinan dan sistem penjaminan mutu, kualitas maha-

siswa dan lulusan, serta sumber daya manusia. Komponen berikutnya adalah pembelajaran dan kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama. Akreditasi A ini menunjukkan bahwa UMY merupakan universitas yang berkualitas di berbagai aspek dalam perjalanannya.

Keberhasilan yang diraih pada tahun 2013 ini membuktikan bahwa UMY mampu bersaing, baik dengan PTN maupun PTS nasional. Akreditasi A yang diperoleh sekaligus membuktikan bahwa UMY telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya dan hasil dari kerja keras berbagai elemen yang ada di UMY. Diharapkan dengan menjadi PTS terbaik di DIY dan Jateng serta menempati posisi ke 14 perguruan tinggi se Nasional, UMY dapat berprestasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan terus mendunia.

# KOMENTAR DOSEN & MAHASISWA



**Sugeng Riyanto, S.IP. M.Si.**

Istilah Paradox of Plenty dalam ungkapan salah satu ilmuan HI dikenal dengan istilah 'Prosperity and Scarcity' yang dapat diartikan sebagai kelangkaan dan kelimpahpuruhan. Jika dilihat salah satu contohnya yakni negara kita sendiri, Indonesia. Betapa Indonesia mempunyai modal yang membuat negara lain kaya raya. Lihat saja minyak di Timur Tengah, Batu Bara di Eropa Timur, Gas di China, dan Karet di Malaysia, seluruh Sumber Daya Alam tersebut dimiliki Indonesia, namun justru negara kita ini menjadi negara yang tertinggal.

Tetapi jika dipahami lebih mendalam, justru Sumber Daya yang melimpah inilah yang membuat rakyat Indonesia malas, mempunyai daya juang yang rendah, gaya hidup instan, dan kreativitas yang tidak berkembang. Kontras dengan negara lain yang memiliki Sumber Daya terbatas, hal ini justru memacu negara mereka untuk maju dan bekerja lebih keras lagi.



**Muhammad Zahrul Anam, S.IP., M.A.**

Paradox of Plenty, jika diartikan kata per kata yakni Paradox yang berarti tidak sesuai dengan kenyataan, sedangkan Plenty berarti kelimpahpuruhan. Jika disederhanakan, maka akan sesuai dengan salah satu ungkapan 'Anak Ayam Mati di Lumbung Padi'.



**Dra. Mutia Hartati Hussin, M.Si.**

Jika dipahami dalam perspektif Islam, Paradox of Plenty justru menggambarkan sebuah realita betapa melimpah ruah, atau berlebihnya sesuatu yang justru membawa dampak yang tidak baik. Jika sesuatu berlebih pasti ada sisi jeleknya. Dari definisi 'Plenty' sudah memuat ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan terjadi. Intinya, apapun yang berlebihan pasti tidak baik, dan hal tersebut sudah diatur dalam Agama sehingga hal – hal yang berlebihan harus diwaspadai.



**M. Toha Eka Prasetya**  
Mahasiswa HI 2012

Di dalam menanggapi isu paradox of plenty ini, hendaknya kita perlu memperhatikan sistem politik dari negara yang bersangkutan. Dengan begitu, kita akan memahami bagaimana pemerintah dari negara tersebut mengolah dan memanfaatkan segala potensi SDA dan SDM yang dimilikinya



**Utari Dina Sari**  
Mahasiswa HI 2012

Ada banyak faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena Paradox Of Plenty belakangan ini. Diantaranya adalah hegemoni kapitalisme, kualitas SDM di negara yang bersangkutan, bahkan sampai kurang tersedianya lapangan kerja yang mengakibatkan terhambatnya kemakmuran negara tersebut. Contohnya saja Indonesia. Indonesia punya SDA yang melimpah ruah, namun karena SDM buruk dan teknologi yang tidak memadai, negara kita tidak mampu mengolahnya dengan baik. Hasilnya ya seperti apa yang terjadi sekarang, kekayaan kita malah dinikmati oleh negara lain, bukan oleh kita sendiri.

## S A C K

### **(Silver Age Celebration of Komahi)**

- **Earth for Us**

Pada tanggal 27 April 2013 akan dilaksanakan pembukaan rangkaian acara “Silver Age Celeration of KOMAHI (SACK)” yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan agenda pertama dari rangkaian agenda SACK yaitu Earth for Us yang kemudian disingkat menjadi EOS. Acara akan diselenggarakan di Gedung AR. Fachrudin lantai 5 Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- **Diplomatic Course**

Agenda selanjutnya adalah “Diplomatic Course” yang kemudian disingkat menjadi DC akan dilaksanakan pada tanggal 4, 7, 8, dan 9 Mei 2013 bertempat di Gedung AR. Fachrudin B Lantai 5 Kampus Terpadu UMY dan di Hotel Phoenix Yogyakarta.

- **European Union Day**

Pada tanggal 11 Mei 2013 akan dilaksanakan “European Union Day”, bertempat di Halaman Timur Gedung Sportorium Kampus Terpadu UMY.

- **KOMAHI Futsal Cup**

KOMAHI Futsal Cup yang kemudian disingkat menjadi KFC menjadi agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan pada 14-16 Mei 2013 bertempat di Lapangan Futsal Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- **KOMAHI BIRTHDAY PARTY**

KOMAHI Birthday Party yang kemudian disingkat menjadi KOMBAT menjadi agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan pada 18 Mei 2013 bertempat di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- **Talk Show & Lomba Essay**

Pada tanggal 21 Mei 2013 akan diselenggarakan Talk Show & Lomba Essay, bertempat di Kampus Terpadu UMY.

- **Malam Refleksi Perjalanan**

Agenda terakhir sekaligus penutupan rangkaian acara “Silver Age Celebration of KOMAHI (SACK)” adalah Malam Refleksi Perjalanan 25 Tahun KOMAHI UMY bertempat di Kampus Terpadu UMY.